

## FORMULIR P.KKPR NONBERUSAHA

Nomor : Sleman, .....

Perihal : Pendaftaran P.KKPR Kepada Yth.  
Non Berusaha Yth Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Sleman

Kami yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan pendaftaran P.KKPR Non-BERUSAHA untuk kegiatan ..... dengan data sebagai berikut :

### I. DATA PEMOHON

#### A. PERORANGAN/BADAN HUKUM

1. Nama/Pengurus/Direktur : .....
2. Nomor Induk Kependudukan : .....
3. Alamat : .....  
RT: ..... RW: ....., Padukuhan: .....  
Kalurahan: ..... Kepanewon : .....
4. No Hp/WA : .....
5. Jabatan : .....
6. Badan/PT/Yayasan : .....
7. Nomor dan Tanggal : .....
  - A. Akta Pendirian : .....
  - B. Akta Perubahan Akhir : .....
  - C. Pengesahan Awal : .....
  - D. Pengesahan Perubahan Terakhir : .....
8. Alamat Badan/PT/Yayasan : .....  
RT: ..... RW: ....., Padukuhan: .....  
Kalurahan: ..... Kecamatan: .....
9. NPWP (*apabila pemohon berbentuk badan*) : .....
10. Email Aktif : .....

**II. KODE KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI)** : 5 digit KBLI (terlampir jika lebih dari satu)

Judul KBLI : ..... (terlampir jika lebih dari satu)

Modal Investasi (diluar tanah dan bangunan) : ..... (Juta / Milyar)

**III. DATA HAK ATAS TANAH** :

1. Lokasi tanah

    a. Nomor/Jalan : .....

    b. Padukuhan : ..... RT: ..... RW: .....

    c. Kalurahan : .....

    d. Kecamatan/Kapanewon : .....

2. Koordinat Geografis yang dimohon : x1y1; x2y2; x3y3; x4y4; dst

3. Luas tanah : .....m<sup>2</sup>/Ha

4. Rencana jumlah lantai bangunan : ..... lantai

5. Rencana luas lantai bangunan : ..... m<sup>2</sup>

6. Bukti hak atas tanah

    a. Status dan nomor hak atas tanah

        1) SHM / HGB / Hak Pakai / Letter C / Model D / Model E / SG \*)

            Nomor : .....

            Surat Ukur/ G.Situasi : .....

        2) SHM / HGB / Hak Pakai / Letter C / Model D / Model E / SG \*)

            Nomor : .....

            Surat Ukur/ G.Situasi : .....

    b. Status penggunaan : milik sendiri / sewa / kerjasama / pinjam pakai \*)

    c. Keadaan tanah : sawah / tegal / darat / pekarangan \*)

7. Kondisi tanah saat ini : terbangun/belum terbangun \*)

8. Nomor Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) :

\*) coret yang tidak perlu

Demikian permohonan kami, atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terimakasih.

Pemohon,

---

**Form Permohonan PTP**

**Kepada Yth  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman  
Di**

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama Pemohon : .....
- 2. Nomor Induk Kependudukan : .....
- 3. Nomor Induk Berusaha (NIB\*) : .....
- 4. Bertindak untuk dan atas nama : PT. .... / .Diri Sendiri (Perorangan)
- 5. Anggaran Dasar Perusahaan : Tanggal ..... Nomor ..... \*\*)

SK Pengesahan

Dengan ini mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk **Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan Nonberusaha.**

Rencana Kegiatan / Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah : .....

Kode dan nama KBLI \*\*\*\*) : .....

Dengan keterangan sebagai berikut :

- 1. Letak tanah yang dimohonkan
  - a. Jalan, nomor, RT, RW : .....
  - b. Desa/Kalurahan : .....
  - c. Kecamatan/Kapanewon : .....
- 2. Luas tanah yang dimohonkan : .....
- 3. Status/penguasaan tanah : .....
- 4. Penggunaan tanah saat ini : .....

Demikian permohonan ini kami sampaikan, kami bertanggung jawab atas kebenaran persyaratan yang dilampirkan diatas, dan kami menyatakan akan mematuhi semua ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam pertimbangan teknis pertanahan.

Sleman, .....

NB.

- \*) untuk pemohon pelaku usaha yang sudah memiliki NIB OSS RBA
- \*\*) khusus pemohon berbadan hukum
- \*\*\*) Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (untuk pelaku usaha)

Yang menyatakan,

Tanda Tangan - Materai  
Rp. 10.000- Cap Perusahaan  
(.....)

NB. Form diisi apabila belum memiliki Dokumen PTP

**PROPOSAL**  
**(KHUSUS RUMAH TEMPAT TINGGAL)**

1. Rencana Kegiatan : Pembangunan
2. Maksud : Mengajukan Pertimbangan Teknis Pertanahan
3. Tujuan : Agar tata lingkungan bangunan sesuai standar yang disyaratkan Pemerintah
4. Sasaran Kegiatan :
  - a. Apabila status tanah masih sawah, mohon Izin Pertimbangan Teknis Pertanahan dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah
  - b. Proses perolehan tanah tepat waktu sesuai izin
  - c. Pencatatan status tanah pertanian ke tanah pekarangan
  - d. Mengajukan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
  - e. Mendirikan bangunan sesuai dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
5. Luas tanah yang akan dibangun..... M<sup>2</sup>)  
Dengan rincian a. Luas Bangunan.....M<sup>2</sup>)  
b. Luas Fasilitas..... M<sup>2</sup>)
6. Demikian proposal ini ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Sleman, .....

Pemohon,

(.....)

**RENCANA PENGGUNAAN TANAH**  
(KHUSUS RUMAH TEMPAT TINGGAL)

- 1. Pemohon : .....
- 2. Luas Tanah : .....
- 3. Letak : .....

Pemohon

(.....)

- a. Luas Tanah : .....
- b. Luas Bangunan : .....
- c. Luas Ruang Terbuka : .....

#### IV. PERSYARATAN PKKPR-NU / DOKUMEN PTP

1. E-KTP pemohon perorangan atau pimpinan badan/yayasan (***apabila PKKPR-NU berbentuk badan/yayasan***);
2. Surat kuasa pengurusan KKPR bermaterai cukup dan E-KTP penerima kuasa;
3. Nomor Pokok Wajib Pajak Wilayah pemohon (***apabila pemohon berbentuk badan***);
4. Akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (***apabila pemohon berbentuk badan***);
5. Proposal kegiatan (bukan rumah tinggal), yang memuat paling sedikit jenis kegiatan secara spesifik, latar belakang, tujuan, dan uraian kegiatan (***apabila pemohon berbentuk badan***);
6. polygon lokasi kegiatan (bidang tanah) pada aplikasi google earth dalam format kmz;
7. Dokumen hak atas tanah (***apabila permohonan PKKPR NU Paralel atau belum memiliki PTP dari BPN, dokumen hak atas tanah harus terVALIDASI di BPN/ATR Kabupaten Sleman***);
8. Surat kerelaan bermaterai cukup atau dokumen lain yang berkaitan dengan kepemilikan tanah (perjanjian sewa, perikatan jual beli), (***apabila pemohon bukan pemilik tanah***);
9. Gambar site tanah sesuai dengan bukti hak atas tanah yang akan digunakan untuk rencana kegiatan apabila pemohon PKKPR telah memiliki dan/atau menguasai tanah;
10. Gambar rencana tata/tapak bangunan dengan skala minimal 1:250;
11. Surat pernyataan bermaterai cukup berisi pernyataan mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan KKPR, dan tanah yang dimohonkan tidak dalam sengketa (Terlampir);
12. Dokumen Pertimbangan Teknis Pertanahan dari BPN/ATR Kabupaten Sleman

#### **Apabila BELUM memiliki Dokumen PTP. melampirkan :**

1. Formulir Permohonan PTP BPN/ATR (terlampir)
2. Formulir Proposal untuk kegiatan Rumah Tinggal (form terlampir)
3. Surat Keterangan Dari Bank Apabila Dokumen Tanah diagunkan di Bank (Hak Tanggungan)
4. SPPT PBB Tahun Berjalan

#### **Apabila fungsi bangunan adalah TEMPAT IBADAH wajib melampirkan :**

1. Daftar nama pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah dan dilampiri fotokopi KTP
2. Daftar nama pendukung pendirian rumah ibadat dari masyarakat setempat paling sedikit 60 orang disahkan oleh kepala desa dan dilampiri fotokopi KTP
3. Surat rekomendasi tertulis dari FKUB
4. Surat rekomendasi Kantor Kementerian Agama Kab. Sleman

Berkas permohonan scan dan diupload sesuai warna dan ukuran aslinya, (bukan hasil foto hp tidak diperkecil/diperbesar);

Pendaftaran lewat aplikasi SINOM : perizinan.slemankab.go.id.

**PAKTA INTEGRITAS**  
**PENGURUSAN PERIZINAN**  
**PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN SLEMAN**

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama :  
Jabatan dalam lembaga/ institusi :  
Nama lembaga/ institusi :  
Alamat :

Adalah benar merupakan pribadi/ pimpinan dari pribadi/lembaga/institusi/perusahaan tersebut diatas yang untuk selanjutnya bertindak atas nama pribadi/lembaga/institusi/perusahaan sebagai pemohon izin.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima pada DPMPTSP Kabupaten Sleman, saya menyatakan bersedia untuk:

1. Tidak menjanjikan dan atau memberikan dan atau akan memberikan kepada petugas/ pejabat DPMPTSP Kabupaten Sleman, segala bentuk pemberian/ gratifikasi atas layanan jasa yang dimohonkan kepada DPMPTSP Kabupaten Sleman;
2. Tidak mempergunakan jasa perantara/ calo dalam hal pengurusan perizinan;
3. Tidak melakukan segala bentuk pembayaran tidak sah kepada DPMPTSP Kabupaten Sleman dalam pengurusan perizinan, kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. Mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dalam pengurusan perizinan;
5. Menyatakan bahwa segala data, dokumen, informasi, keterangan atas pengajuan permohonan yang saya serahkan adalah benar dan tidak dalam status sengketa dengan pihak lain. Apabila ternyata tidak sesuai/benar, maka produk hukum yang dikeluarkan berdasarkan permohonan ini adalah tidak sah dengan sendirinya;
6. Apabila saya tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan, saya bersedia menerima pembinaan dan pengawasan serta sanksi dari pejabat yang berwenang.
7. Apabila terbukti adanya pelanggaran terhadap isi PAKTA INTEGRITAS ini, Saya atas nama pribadi, lembaga/ institusi/ perusahaan bersedia untuk diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAKTA INTEGRITAS ini dibuat dan ditandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :

Pada tanggal :

Saya yang membuat  
pernyataan, Pemohon

Meterai Rp 10.000,-  
Stempel Perusahaan

.....